



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI  
KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Nurul Rizqia Utami

022118143

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2022**

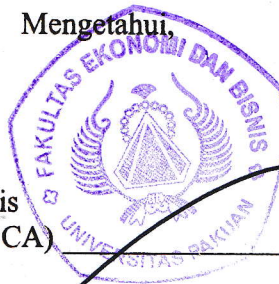


**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI  
KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,  
CCSA, CA, CSEP, QIA., CFE., CGCAE)

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI  
KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2016-2020**

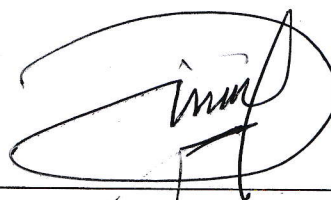
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Rabu Tanggal : 06 / Juli / 2022

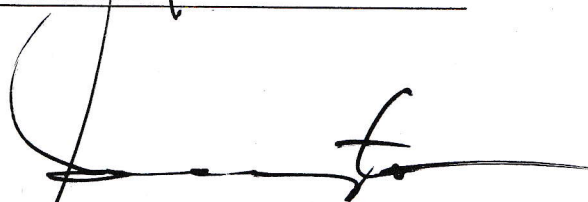
Nurul Rizqia Utami  
022118143

Disetujui

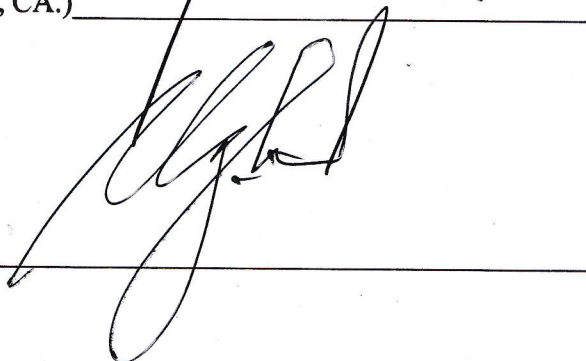
Ketua Penguji Sidang  
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA.)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Drs. Edy Sudaryanto, Ak., MM., CA.)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Sigit Edy Surono, Drs., MM.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Rizqia Utami

NPM : 022118143

Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari pdouk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 6 Juli 2022



D4CA0AJX426980287  
Nurul Rizqia Utami  
022118143

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022\*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang megumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpd seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*\*)Tahun menyesuaikan dengan tahun lulus.*

## ABSTRAK

NURUL RIZQIA UTAMI. 022118143. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020. Dibawah bimbingan : EDY SUDARYANTO DAN SIGIT EDY SURONO. 2022.

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dengan bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.

Penelitian ini mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, dengan jenis data yang diteliti ialah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder dengan menggunakan Teknik sampling jenuh. Uji analisis dan regresi menggunakan aplikasi SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini adalah 0,919 hal ini berarti variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 91,9%, sisanya sebesar 8,1% dipengaruhi oleh variabel independent lain. Saran yang peneliti sampaikan adalah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten Cianjur sehingga dapat meningkatkan Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Cianjur. Dengan meningkatnya Belanja Modal tersebut dapat diikuti dengan meningkatnya fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur, serta rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal*

## **PRAKATA**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan Rhido-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020”.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan dan semangat dari orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT telah memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA.,CSEP.,QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Drs. Edy Sudaryanto, Ak., MM., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan-masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Sigit Edy Surono, Drs., MM. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan peneliti.
8. Orang tua tercinta Bapak Solehudin dan Ibu Sriprihartini yang telah memberikan semangat, doa, dan dorongan moril serta spiritual.
9. Kakak tercinta Novia Septiyani
10. Seluruh rekan mahasiswa Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik dan kelas D Angkatan 2018 serta sahabat-sahabat terbaik saya Mega Putri, Rizkiadinda CCP, Della Maulina, Syifa Amalina, Felicia Rascha, dan Friska Elen yang ikut memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran penulis terima dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Juli 2022

Nurul Rizqia Utami



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| JUDUL .....   |      |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....                                  | i    |
| LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....                    | iv   |
| LEMBAR HAK CIPTA .....  | v    |
| ABSTRAK .....   | vi   |
| PRAKATA.....  | vii  |
| DAFTAR ISI.....   | ix   |
| DAFTAR TABEL.....   | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian .....                            | 1    |
| 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....                    | 5    |
| 1.2.1. Identifikasi Masalah.....                                | 5    |
| 1.2.2. Perumusan Masalah .....                                  | 5    |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....                         | 6    |
| 1.3.1. Maksud Penelitian.....                                   | 6    |
| 1.3.2. Tujuan Penelitian .....                                  | 6    |
| 1.4. Kegunaan Penelitian.....                                   | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                    | 7    |
| 2.1. Landasan Teori.....  | 7    |
| 2.1.1. Anggaran Berbasis Kinerja .....                          | 7    |
| 2.1.2. Siklus Perencanaan Anggaran Daerah .....                 | 7    |
| 2.1.3. Struktur APBD .....                                      | 8    |
| 2.2. Pertumbuhan Ekonomi .....                                  | 8    |
| 2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....                      | 8    |
| 2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi..... | 9    |
| 2.3. Pendapatan Asli Daerah .....                               | 11   |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....        | 11        |
| 2.3.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....      | 12        |
| 2.3.3. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD).....        | 13        |
| 2.4. Belanja Modal .....                              | 16        |
| 2.4.1. Pengertian Belanja Modal .....                 | 16        |
| 2.4.2. Indikator Belanja Modal.....                   | 17        |
| 2.5. Penelitian Sebelumnya .....                      | 18        |
| 2.6. Kerangka Pemikiran.....                          | 24        |
| 2.7. Hipotesis Penelitian.....                        | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                 | <b>27</b> |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                           | 27        |
| 3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian ..... | 27        |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....           | 27        |
| 3.4. Operasionalisasi Variabel.....                   | 27        |
| 3.5. Metode Penarikan Sampel.....                     | 28        |
| 3.6. Metode Pengumpulan Data .....                    | 28        |
| 3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data .....            | 29        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>34</b> |
| 4.1. Hasil Pengumpulan Data.....                      | 34        |
| 4.1.1. Lokasi Penelitian .....                        | 34        |
| 4.1.1.1. Gambaran Umum Organisasi.....                | 34        |
| 4.1.1.2. Struktur Organisasi.....                     | 35        |
| 4.2. Fakta Variabel yang Diteliti .....               | 40        |
| 4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....                       | 40        |
| 4.2.2. Pendapatan Asli Daerah .....                   | 42        |
| 4.2.3. Belanja Modal .....                            | 43        |
| 4.3. Hasil Penelitian .....                           | 46        |
| 4.3.1. Hasil Analisis data.....                       | 46        |
| 4.3.2. Uji Asumsi Klasik .....                        | 46        |

|   |    |
|---|----|
| 4.3.2.1. Uji Normalitas.....  | 46 |
| 4.3.2.2. Uji Multikolinearitas .....  | 47 |
| 4.3.2.3. Uji Autokorelasi.....  | 48 |
| 4.3.2.4. Uji Heteroskedastisitas.....   | 49 |
| 4.3.3. Uji Regresi Linear Berganda.....   | 49 |
| 4.3.4. Uji Hipotesis.....   | 51 |
| 4.4. Pembahasan.....  | 53 |
| 4.4.1. Pengaruh Secara Parsial (Uji t) .....  | 53 |
| 4.4.2. Pengaruh Secara Simultan (Uji F).....  | 54 |
| 4.4.3. Uji Koefisien Determinasi.....   | 55 |
| 4.5. Interpretasi Hasil Penelitian .....  | 56 |
| 4.5.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal .....                            | 56 |
| 4.5.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....                          | 56 |
| 4.5.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal ..... | 57 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....   | 58 |
| 5.1. Kesimpulan.....  | 58 |
| 5.2. Saran.....   | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 60 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....   | 63 |
| LAMPIRAN.....   | 64 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kabupaten Cianjur Periode 2016 – 2020 (Dalam Rupiah) ..... | 3  |
| Tabel 2.1. Tarif Pajak Kabupaten dan Kota .....  | 14 |
| Tabel 2.2. Prinsip Penentuan Tarif Retribusi .....   | 15 |
| Tabel 2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya .....   | 19 |
| Tabel 3.1. Variabel Operasional .....  | 28 |
| Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Harga Konstan Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020 .....                            | 41 |
| Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020 .....   | 41 |
| Tabel 4.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020 .....  | 43 |
| Tabel 4.4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020 .....                                  | 43 |
| Tabel 4.5. Belanja Modal Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020 .....   | 45 |
| Tabel 4.6. Rasio Aktivitas Belanja Modal Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020 .....   | 45 |
| Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas .....  | 47 |
| Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinearitas .....   | 48 |
| Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi .....  | 48 |
| Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....  | 49 |
| Tabel 4.11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....  | 50 |
| Tabel 4.12. Hasil Uji Parsial (t-test) .....   | 51 |
| Tabel 4.13. Hasil Uji Simultan (F-test) .....  | 52 |
| Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....  | 52 |
| Tabel 4.15. Hasil Pengujian Hipotesis .....  | 54 |
| Tabel 4.16. Hasil Pengujian Hipotesis .....  | 55 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.....                                 | 2  |
| Gambar 2.1. Konstelasi Penelitian.....   | 25 |
| Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Cianjur .....    | 35 |
| Gambar 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020...                              | 42 |
| Gambar 4.3. Grafik Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur<br>Periode 2016-2020 ..... | 44 |
| Gambar 4.4. Grafik Rasio Aktivitas Belanja Modal Kabupaten Cianjur Periode 2016-<br>2020 .....           | 46 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Cianjur Tahun 2019 – 2020
- Lampiran 2 : Data Perhitungan Rasio Pertumbuhan Ekonomi
- Lampiran 3 : Data Perhitungan Rasio Pendapatan Asli Daerah
- Lampiran 4 : Data Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal
- Lampiran 5 : Hasil *Output SPSS*, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 6 : Hasil *Output SPSS*, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Korelasi Parsial (*Pearson*), dan Uji Korelasi Simultan
- Lampiran 7 : Hasil *Output SPSS*, Uji t Test, Uji F Test, dan Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 8 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian diperbarui kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Penetapan UU No.23 tahun 2014 memberi pemerintah kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah dirancang guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja lebih besar dari pengangguran dan berkurangnya tingkat kemiskinan.

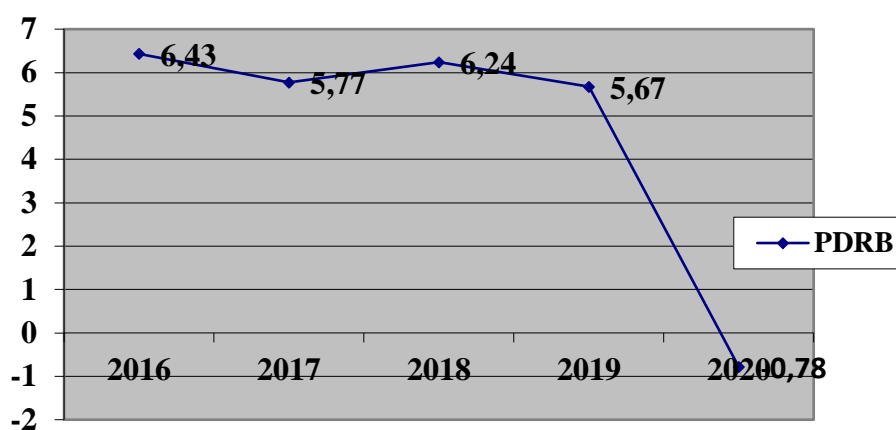
Dalam pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Kemajuan ekonomi Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tahun ke tahunnya. Dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu dari sekian perangkat indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan di Kabupaten Cianjur.

Nilai PDRB Cianjur pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Berikut disajikan gambar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur selama periode 2016 – 2020 dibawah ini :

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020 (dalam persen)**



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, meskipun mengalami fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur menunjukkan *trend positif*. Tetapi 2020 PDRB mengalami penurunan yang sangat tajam, penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya produksi di banyak lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Cianjur pada tahun 2020 yang negatif disebabkan karena turunnya produksi di banyak lapangan usaha, termasuk didalamnya Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif hingga (16,22) persen dibanding tahun sebelumnya. Diikuti perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan perdagangan, serta beberapa usaha lainnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi



daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang, menurunnya kinerja perekonomian daerah yang berimbas pula kepada penurunan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Imbas kepada daerah menyebabkan menurunnya pendapatan daerah baik dari transfer dari pusat ke daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu adanya efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah agar lebih terarah dan pemberian skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Belanja Modal, daerah dapat melaksanakan pembangunan berbagai fasilitas, yakni dengan memfasilitasi kepentingan publik. Oleh karena itu pemerintah untuk mampu melaksanakan pembangunannya secara maksimal. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Cianjur selama lima tahun terakhir yaitu periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Kabupaten Cianjur Periode 2016 – 2020 (Dalam Rupiah)**

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Belanja Modal     |
|-------|------------------------|-------------------|
| 2016  | Rp455.156.876.756      | Rp616.244.100.821 |
| 2017  | Rp535.232.527.172      | Rp823.214.700.634 |
| 2018  | Rp569.844.590.576      | Rp595.800.022.345 |
| 2019  | Rp628.558.761.864      | Rp690.653.593.571 |
| 2020  | Rp576.995.439.254      | Rp384.911.926.929 |

*Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Cianjur, 2022 (data diolah)*

Pada tabel 1.2. menunjukkan bahwa tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan realisasi belanja modal mengalami fluktuasi dengan adanya penurunan pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja modal tersebut terjadi karena kurang penyerapan disebabkan adanya efisiensi dan belum dilaksanakannya pembayaran kepada pihak ketiga karena keterlambatan proses pencairan termasuk biaya pemeliharaan. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp58.714171.288,13, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 telah dilakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan sehingga realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2019 dapat ditingkatkan. Lalu pada tahun anggaran 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cianjur masih menurun dikarenakan ada beberapa revisi dari Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2020, yaitu pengurangan atau penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku usaha untuk memperkuat

ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga dapat membuat Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan karena realisasi terbesar dari PAD berasal dari pajak daerah dan ini salah satu penyebab belum optimalnya Pengelolaan Belanja Modal di Kabupaten Cianjur. Selain itu Pertumbuhan Ekonomi yang tingkat pembangunannya belum optimal karena pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi dibanyak lapangan usaha, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak pada aktivitas belanja modal yang salah satu sumbernya dari PAD.

Berdasarkan data – data diatas berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Cianjur, dapat dilihat bahwa dari permasalahan yang terjadi adalah pengalokasian APBD Kabupaten Cianjur masih belum maksimal, hal ini memberikan pengaruh untuk penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih dianggap belum optimal. PAD pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi di karenakan realisasi pendapatan retribusi daerah lebih kecil dibandingkan target yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Cianjur sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun fenomena yang terkait dengan penjelasan sebelumnya yaitu pada tahun 2016 – 2020, dengan terjadi fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi dengan penurunan secara tajam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 disebabkan karena turunnya produksi dibanyak lapangan usaha. Namun, pada tahun 2016-2020 belanja modal mengalami fluktuasi karena belanja modal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi yang salah satu sumbernya berupa tingkat pembangunan yang masih belum optimal, menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada aktivitas belanja modal dan rendahnya penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2020 karena dampak untuk daerah itu sendiri yakni infrastruktur yang kurang memadai di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan pemahaman dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020”**.

## 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi yang menunjukkan *trend positif* tetapi pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi negatif di karenakan mengalami penurunan produksi dibanyak lapangan usaha.
2. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 – 2019 mengalami fluktuasi karena realisasi retribusi daerah yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah, pada tahun 2020 penurunan akibat pengurangan atau penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku usaha untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
3. Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada aktivitas belanja modal yaitu rendahnya penyerapan anggaran Belanja Modal yang diperuntukkan untuk infrastruktur.

Sehingga penelitian ini ingin membuktikan seberapa signifikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Cianjur dengan periode 2016 – 2020.

### 1.2.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian maka perumusan masalah dalam penelitian ini bahwa pemulihan ekonomi diharapkan bisa efektif, oleh karena itu pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus dan serius dalam menangani kebutuhan daerah dengan cara meningkatkan kemandirian daerah dengan peranan pendapatan asli daerah dan yang menjadi permasalahan yaitu belanja modal harus diperuntukkan untuk infrastruktur dan apabila semua biaya yang digunakan untuk pembiayaan yang tidak diperuntukkan maka anggaran belanja modal akan rendah.

Lokasi penelitian dan periode penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini difokuskan kepada Kabupaten Cianjur dengan periode penelitian 2016 – 2020. Pentingnya Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan karena hasilnya belum konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020?
- 2) Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020?
- 3) Apakah secara simultan (bersama-sama) terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Dalam topik penelitian yang terdiri dari lebih satu variabel, maksud penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal serta Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Modal, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan serta untuk memperoleh data yang relevan dan informasi yang akurat guna melengkapi teori yang berhubungan dengan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016 – 2020.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020.
- 2) Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan (bersama-sama) Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis, Penelitian ini untuk membantu mengantisipasi dan memecahkan masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan Pemerintah Daerah dalam kebijakan terkait proporsi Anggaran Belanja Modal dengan mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Kegunaan Akademis/Teoritik, Penelitian ini untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi pada umumnya dan pada khususnya Akuntansi Sektor Publik, terutama dalam hal Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah BAB I pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyatakan bahwa Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

##### **2.1.2. Siklus Perencanaan Anggaran Daerah**

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD.
2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

### **2.1.3. Struktur APBD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri No.13 Tahun 2006).

## **2.2. Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Khabibah (2018), Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. pertumbuhan ekonomi daerah ditandai dengan kenaikan pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja lebih besar dari pengangguran dan berkurangnya tingkat kemiskinan. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Dalam buku ekonomi pembangunan, Patta Rapanna (2017) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dapat juga dikatakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka

panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (Oktari, 2017). Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang mandiri melalui Belanja Modal yang direlasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik (Waskito, 2019).

Adapun menurut Syahputra (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai *Modern Economic Growth*. Untuk menghitung berapa besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka data yang diperlukan dan dipergunakan adalah Pendapatan Nasional suatu Negara. Untuk negara yang sedang berkembang umumnya menggunakan PDB, sedangkan untuk negara yang telah maju umumnya menggunakan GNP. Terdapat banyak rumus yang dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, menurut Patta Rapanna (2017), indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$$

BPS (2017) mengemukakan pengertian Produk Domestik Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan riil perkapita memang bukanlah satu-satunya saran di negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

### **2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Rapanna (2017) Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Dalam penelitian Lestari (2017) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumberalam tidak akan membangun dengan cepat

#### b. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

#### c. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

#### d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

#### e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantuperkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti



faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi.

## 2.3. Pendapatan Asli Daerah

### 2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipungut pihak daerah berdasarkan peraturan daerah yang selaras pada aturan perundang-undangan yang ada (Badrudin, 2017 : 52). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan maka setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pertanggungjawaban tersebut tidaklah cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

Menurut Mahmudi (2016 : 89), Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat banyak rumus yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menurut Mahmudi (2016) dengan menggunakan indikator yang digunakan adalah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang di anggarkan. Rumus rasio efektivitas PAD dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dan memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat Efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90-99%
- Kurang Efektif : 75%-89%
- Tidak Efektif : < 75%

Secara konseptual perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan

daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanjadaerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi pendapatan asli daerah maksimalnya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusi terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Halim, 2004).

Pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD berdasarkan UU Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun yang menjadi sumber PAD terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Pendapatan lain lain Asli Daerah yang Sah.

### **2.3.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2. Retribusi Daerah**

Menurut UU Nomor : 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

#### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

UU Nomor : 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 yang dicabut menjadi UU Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

#### **2.3.3. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 jenis yaitu :

##### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak.

Penerimaan ini meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Kendaraan Diatas Air
- d. Pajak Air dibawah Tanah
- e. Pajak Air Permukaan.

Pajak daerah dan retribusi daerah tersusun dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

**Tabel 2.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota**

| No | Pajak Kabupaten dan Kota                  | Tarif Maksimum (%) |
|----|---|--------------------|
| 1  | Pajak Hotel                               | 10                 |
| 2  | Pajak Restoran                            | 10                 |
| 3  | Pajak Hiburan                             | 35                 |
| 4  | Pajak Reklame                             | 25                 |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                    | 10                 |
| 6  | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 20                 |
| 7  | Pajak Parkir                              | 20                 |

*Sumber : UU Nomor 34 Tahun 2000*

Sistem pengenaan pajak :

- a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginyadasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
- b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda..
- c) Pajak degresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakinkecil.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Penerimaan ini meliputi :

- a. Retribusi Umum Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain :
  - 1) Pelayanan kesehatan
  - 2) Pelayanan kebersihan dan persampahan
  - 3) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.
  - 4) Pengujian kapal perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha
  - 1) Pemakaian kekayaan daerah.
  - 2) Pelayanan terminal (3) Pelayanan tempat khusus parkir
  - 3) Tempat rekreasi dan olahraga
- c. Retribusi Perizinan Tertentu  
Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain :

- 1) Izin peruntukan penggunaan tanah
- 2) Izin mendirikan bangunan
- 3) Izin trayek
- 4) Izin pengambilan hasil hutan

**Tabel 2.2 Prinsip Penentuan Tarif Retribusi**

| No | Objek atau Jenis Retribusi Daerah | Prinsip atau Kriteria Penentuan Tarif  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | Retribusi Jasa Umum               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya biaya atau penyediaan jasa yang bersangkutan</li> <li>2. Kemampuan masyarakat</li> <li>3. Aspek keadilan</li> </ol> |
| 2  | Retribusi Jasa Usaha              | Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak  |
| 3  | Retribusi Perizinan Tertentu      | Tujuan untuk menutup semua/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan  |

*Sumber : UU Nomor 34 Tahun 2000*

### 3. Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari :

- a. Hasil penjualan barang milik daerah, contoh penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon anyaman
- b. Penerimaan jasa giro.

## 2.4. Belanja Modal

### 2.4.1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal dibuat untuk menunjang kinerja pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk menghasilkan kinerja yang produktifitas, efektif dan efisien maka dibutuhkan anggaran belanja modal yang mendukung kinerja pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2009 Pasal 1 ayat (14):

Belanja Modal adalah belanja pemerintahan pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) ;

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf C digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset tetap perusahaan. Namun, aset tetap pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mahmudi (2016) analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan Rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja terhadap total belanja daerah adalah 5-20 persen. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut UU Nomor : 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator

produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan pemerintah daerah produktif. Pada umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan ini sangat bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat.

Menurut pendapat yang dinyatakan oleh Badrudin (2017 : 71-72) menjelaskan bahwa belanja modal ini dilaksanakan pengkategorisasian ke dalam lima kategori atau indikator yang utama yaitu :

#### **2.4.2. Indikator Belanja Modal**

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum
2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Adapun jenis-jenis belanja modal yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Baldrick Siregar (2015) tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

##### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan pertaan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siappakai.

##### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatankapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

##### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

##### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biayayang digunakan untuk pengadaan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaanjalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### 2.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya. Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai peneliti sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk membedakan penelitian sebelumnya.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur dengan teori yang lebih baru yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Patta Rapanna (2017) dan Mahmudi (2016). Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu variabel independent pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana secara langsung terhadap daerah dan perbedaan jumlah serta variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut akan disajikan tabel posisi penelitian terdahulu, yang berkaitan atau relevandengan penelitian penulis. Gambaran posisi penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya**

| No. | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian  | Variabel yang diteliti   | Indikator  | Metode Analisis   | Hasil Penelitian   |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1   | Egi Nofrizal<br>(2017)<br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015  | Variabel Bebas :<br>Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah<br><br>Variabel Terikat :<br>Belanja Modal                                      | Belanja tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya<br>PDRB   | Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal   |
| 2   | Muhammad Syukri dan Hinaya<br>(2019)<br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan | Variabel Bebas :<br>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus<br><br>Variabel Terikat :<br>Belanja Modal | Belanja tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya<br>PDRB<br>Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah | Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan ( <i>applied reseearch</i> ) dengan data kuantitatif sekunder   | Pengujian model regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal. |
| 3   | Risna Wati Sirait<br>(2019)<br>Pengaruh  | Variabel Bebas :<br>Pertumbuhan Ekonomi<br><br>Variabel Terikat  | PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang  | Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode penelitian yang  | Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD,   |

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   | Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin   | : Pendapatan Asli Daerah (PAD)   | dipisahkan, dan Lain – lain PAD yang sah   | digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi pustaka. Studi ini digunakan sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari buku, literatur-literatur maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. | retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, namun untuk hasil perhitungan regresi linier sederhana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pajak daerah. |
| 4 | Waskito, Zuhrotun dan Ruserlisyani (2019)<br><br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota Aceh) | Variabel Bebas :<br>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil<br><br>Variabel Terikat :<br>Belanja Modal | Belanja tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya<br><br>PDRB<br>Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah | Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode dokumentasi  | Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanjamodal dan variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanjamodal.         |
| 5 | Mundiroh (2019)<br><br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah,  | Variabel Bebas :<br>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi   | Belanja tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan,  | Analisis deskriptif dengan metode analisis regresi linear berganda  | Hasil analisis menunjukkan seluruh variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi,  |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
|   | Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah   | Hasil Variabel Terikat : Belanja Modal  | Belanja Aset Lainnya PDRB Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah DBH Pajak dan DBH bukan Pajak (SDA)   |   | PAD, DAU dan DBH secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat alokasi belanja modal  |
| 6 | Desak Gede Yudi Atika Sari (2017)<br><br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali | Variabel Bebas :<br>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran<br><br>Variabel Terikat :<br>Belanja Modal | Belanja tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya PDRB Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah | Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mengolah dan mencatat data yang berkaitan dengan data penelitian | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana langsung kepada daerah. |
| 7 | Sri Ayen dan Dessy Dyah Pratama (2018)<br><br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Di Provinsi                         | Variabel Bebas :<br>Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah<br><br>Variabel Terikat :<br>Belanja Modal           | Belanja tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya PDRB Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah,  | Jenis Penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011-2016, selain itu peneliti        | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh  |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
|   | Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016   |   | Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan Lain – lain pendapatan yang sah<br>Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Alokasi Dasar  | menggunakan penelitian sampel, berdasarkan karakteristiknya yang digunakan sebagai sampel adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kota tersebut menerbitkan laporan realisasi APBD 2011-2016   | secara signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.         |
| 8 | Fiona Puspita & Devi Purwanto (2013)<br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal | Variabel Bebas : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli DAerah (PAD), Dana Alokasi Umum<br><br>Variabel Terikat : Belanja Modal | Belanja tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya PDRBt dan PDRBt-1 Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah, Lain – lain Pendapatan yang sah | Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan Dana Alokasi Umum |
| 9 | Lingga Swastika (2013)<br><br>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,  | Variabel Bebas : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  | Belanja Modal Perolehan Tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud  | Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat  | Hasil penelitian menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh  |

|    |   |  |  |   |   |
|----|---|--|--|---|---|
|    | <p>Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali</p>  | <p>Alokasi Umum</p> <p>Variabel Terikat :<br/>Belanja Modal</p>  | <p>Akumulasi Modal, Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja</p> | <p>kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data time series yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.</p> | <p>negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal serta dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.</p>  |
| 10 | <p>Silvianty Meladistia Sitepu (2021)</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara</p> | <p>Variabel Bebas : Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Terikat :<br/>Belanja Modal</p> |  | <p>Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda</p>   | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK, DBH dan PAD secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Sumatera utara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil lainnya dalam penelitian ini menunjukkan</p> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | bahwa secara simultan seluruh variabel independent dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. |
|--|--|--|--|--|---|

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Mengingat masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri maka penggunaan belanja modal harus difokuskan pada program – program yang secara berkesinambungan yang dapat mendukung peningkatan, dan merangsang terciptanya sumber pendapatan baru guna terciptanya kondisi masyarakat yang lebih produktif. Untuk itu, maka perlu dilakukan pengkajian sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk membiayai pengeluaran belanja daerah. Hal ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya agar dapat tepat guna dan berhasil guna. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah dan lain – lain pendapatan yang sah merupakan sumber penerimaan daerah (Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999). Besar kecilnya dan pendapatan asli daerah yang di transfer oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

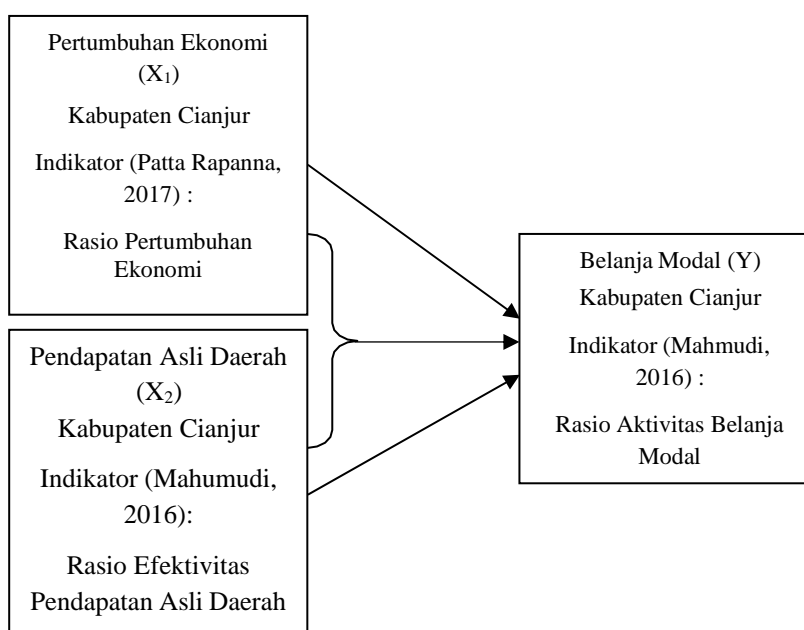
### 2.6.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian dari Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin rendah. Pembangunan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya, meskipun terdapat indikator lain dalam distribusi pendapatan.

### 2.6.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian Sri Ayen dan Dessy Dyah Pratama (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD mengalami peningkatan maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki, salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang besar untuk pembangunan. Berdasarkan hubungan antar variabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh cukup besar terhadap Belanja Modal. Karena semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat sebuah model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Konstelasi Penelitian

## **2.7. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya dengan melihat hasil penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.

Hipotesis 2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.

Hipotesis 3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif, dengan metode *Explanatory Survey* yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau pada umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, di mana data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Cianjur Periode 2016 – 2020. Adapun hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk angka maupun rasio pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen yang diolah oleh aplikasi SPSS versi 16.

### 3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai *Independent Variable* dan Belanja Modal sebagai *Dependent Variable*.

Unit Analisis Penelitian yang digunakan adalah *Geographic Region* maksud dari geografis regional yang diteliti adalah daerah, sehingga data yang digunakan mengenai atau berasal dari (respon) suatu daerah tertentu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) daerah Kabupaten Cianjur dengan lokasi Jl. KH Abdullah Bin Nuh No.15, Sawah Gede, Kecamatan Cianjur.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti oleh penulis ialah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder atau dapat dikatakan data yang telah tersedia pada suatu instansi maupun lembaga. Jadi, dalam penelitian ini data kuantitatif tersebut bersumber dari buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cianjur Periode 2016 – 2020.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya :

- X1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 2. Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen (*Dependent variable*) merupakan variabel yang tergantung atau dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga yang menjadi variabel

dependen dalam penelitian ini adalah Alokasi pada Belanja Modal. Pengertian mengenai Belanja Modal telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

**Tabel 3.1. Variabel Operasional**

| Variabel  | Indikator                                | Ukuran   | Skala Pengukuran |
|---|--|--|------------------|
| <i>Independent</i> (X1)<br>Pertumbuhan Ekonomi          | Rasio Pertumbuhan Ekonomi                | $\frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$   | Rasio            |
| <i>Independent</i> (X2)<br>Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah | $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$        | Rasio            |
| <i>Dependent</i> (Y) Belanja Modal                      | Rasio Aktivitas Belanja Modal            | $\frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$ | Rasio            |

Sumber : Mahmudi, 2016

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur, sampel yang diambil dari populasi menggunakan sampling jenuh yaitu Teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel ini dilakukan karena jumlah populasi relative kecil. Penelitian ini menggunakan sampel data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016 – 2020, yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Cianjur dan BPS Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan keempat pertimbangan tersebut, maka yang dijadikan sampel penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016 – 2020.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mempelajari dokumen – dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan

pencatatan dan perhitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data–data yang relevan. Sumber penggunaannya dengan data

Statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk data Pertumbuhan Ekonomi dan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 – 2020.

### **3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data**

Penulis melakukan uji statistik berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS 16. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **3.7.1. Uji Asumsi Klasik**

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality* Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012, 293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymptotic Significance), yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

##### **b. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat dilakukan Uji Run Test. Runt test merupakan bagian dari statistic non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian, apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Dengan hipotesis sebagai berikut:

- Apabila nilai Asymp, Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka untuk  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak (sistematis) tidak

terjadi gejala autokorelasi.

- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka untuk H0 diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak (random) terjadi gejala autokorelasi.

#### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2010, 234). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012, 432). Menurut Singgih Santoso (2012, 236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}} \text{ atau } \text{Tolerance} = \frac{1}{VIF}$$

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Gujarati (2012, 406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (error). Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meregresikan nilai absolute residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen).

## 2. Analisis Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2014, 277) bahwa:

Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen nya minimal 2.

Menurut Sugiyono (2014, 277) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

|            |   |
|------------|---|
| Y          | = Belanja Modal                                 |
| a          | = Koefisien Konstanta                           |
| $b_1, b_2$ | = Koefisien Regresi dari masing-masing variabel |
| $X_1$      | = Pertumbuhan Ekonomi                           |
| $X_2$      | = Pendapatan Asli Daerah (PAD)                  |

### 3.7.2. Uji Hipotesis

#### 3.7.2.1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Menurut Sugiyono (2014, 250), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial  $r^2$  = Koefisien determinasi

n = jumlah data

(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- $H_0$  diterima jika nilai  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau nilai sig  $> \alpha$
- $H_0$  ditolak jika nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau nilai sig  $< \alpha$

Bila terjadi penerimaan  $H_0$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu Pendapatan Rupiah Murni ( $X_1$ ), Pendapatan Negara Bukan Pajak ( $X_2$ ), terhadap Alokasi Belanja Negara (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- $H_0: \beta = 0$  : tidak terdapat pengaruh yang signifikan
- $H_a: \beta \neq 0$  : terdapat pengaruh yang signifikan

### 3.7.2.2 Uji f (Pengujian Secara Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Alokasi Belanja Modal secara simultan dan parsial.

Menurut Sugiyono (2014, 257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom =  $k(n-k-1)$  dengan kriteria sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai sig  $< \alpha$
- $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai sig  $> \alpha$

Jika terjadi penerimaan  $H_0$ , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan

tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol  $H_0$  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  : tidak berpengaruh signifikan
- $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$  : tidak berpengaruh signifikan

1. Penetapan tingkat signifikansi Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=0$ ) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar-variabel yang diteliti.

2. Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan metode pengujian statistik uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut :

Uji t:

- $H_1$  diterima jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $< -t_{tabel}$
- $H_1$  ditolak jika nilai  $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$

Uji F:

- $H_1$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$
- $H_1$  ditolak jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

### 3.7.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara lain dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Besarnya determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\% \text{ Dimana:}$$

$$Kd = \text{Koefisien determinasi} = r^2 = \text{Koefisien korelasi}$$

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a. Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah
- b. Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan telah diolah pihak lain. Penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cianjur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal, seluruhnya merupakan data dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Cianjur pada tahun 2016-2020.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Cianjur, berdasarkan pengumpulan data dari setiap variabel yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dilakukan analisis mengenai mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel-variabel bebas atau *Independent Variable* tersebut meliputi Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) dan Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) serta Variabel terikat atau *Dependent Variable* yaitu Belanja Modal ( $Y$ ). analisis data yang digunakan untuk penyelesaian masalah menggunakan bantuan *softwere* khusus statistic yaitu SPSS 16.

##### **4.1.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAD) di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur menjadi sampel yang dipilih menggunakan metode sampling jenuh dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

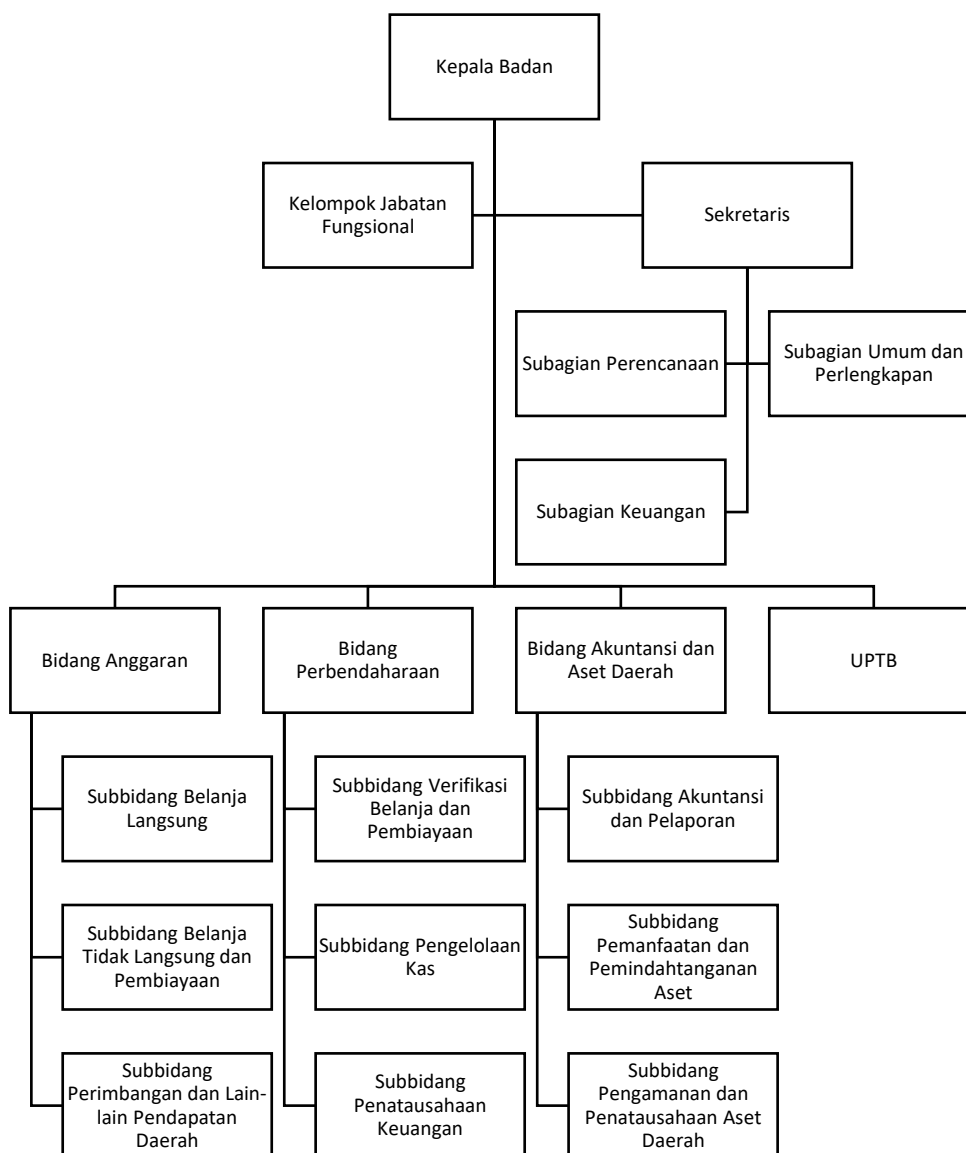
##### **4.1.1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yaitu Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Anggaran.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



#### 4.1.1.2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur mengacu pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Tugas BPKAD adalah melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan. Sedangkan fungsi BPKAD sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2016 berikut ini Tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Cianjur :

#### 1. Kepala

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang keuangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan.
- b. Penyusunan dan penetapan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan.
- c. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang keuangan.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang keuangan.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga, dan penatausahaan badan,
- f. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang keuangan.
- g. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTB.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran sekretariat.

- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran badan.
- c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang keuangan.
- d. Pengelolaan pengurusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan.
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.
- h. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pelaksanaan fasilitas penilaian prestasi kerja di lingkungan badan.
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat membawahi :

- Subagian Keuangan
- Subagian Perencanaan
- Subagian Umum dan Kepegawaian

### 3. Bidang Anggaran

Bidang Anggarandipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, serta dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan Kepala Bidang Anggaran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan proram kerja dan rencana anggaran Bidang Anggaran;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

- c. Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Anggaran.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Anggaran membawahi :

- Subbidang Belanja Langsung
- Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
- Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

#### 4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta pelaksanaan pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Perbendaharaan
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang verifikasi belanja dan pembiayaan, pengelolaan kas, dan penatausahaan keuangan
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan penyerapan anggaran, penyimpanan, dan penempatan uang daerah serta pengelolaan investasi
- d. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- e. Penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan BELanja Daerah oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
- f. Penyusunan kebutuhan gaji pegawai, dan pengendalian pengeluaran kas umu daerah
- g. Penyelenggaraan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Perbendaharaan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perbendaharaan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Bidang Perbendaharaan membawahi :

- Subbidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan
- Subbidang Pengelolaan Kas
- Subbidang Penatausahaan Keuangan

5. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang akuntansi dan aset daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
- b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dinas di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah
- c. Penyusunan kebijakan teknis dinas dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah
- d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah
- e. Pengkoordinasian penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah
- h. Pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

- i. Pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas bidang akuntansi dan aset daerah
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Bidang Akuntansi dan Aset Daerah membawahi :

- Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
- Subbidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah
- Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

6. UPTB

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain melaksanakan tugas sebagai SKPD, BPKAD Kabupaten Cianjur mempunyai tugas sebagai SKPKD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.

## **4.2. Fakta Variabel yang Diteliti**

### **4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan Ekonomi mengukur seberapa baik kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Harga Konstan  
Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi |
|-------|---------------------|
| 2016  | 26.981.369,21       |
| 2017  | 28.538.993,62       |
| 2018  | 30.320.205,61       |
| 2019  | 32.039.593,42       |
| 2020  | 31.789.057,61       |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Cianjur, maka dapat dihasilkan perhitungan Pertumbuhan Ekonomi dengan ukuran yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Ekonomi

Patta Rappana, 2017

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Cianjur pada tabel 4.1 sebagai berikut :

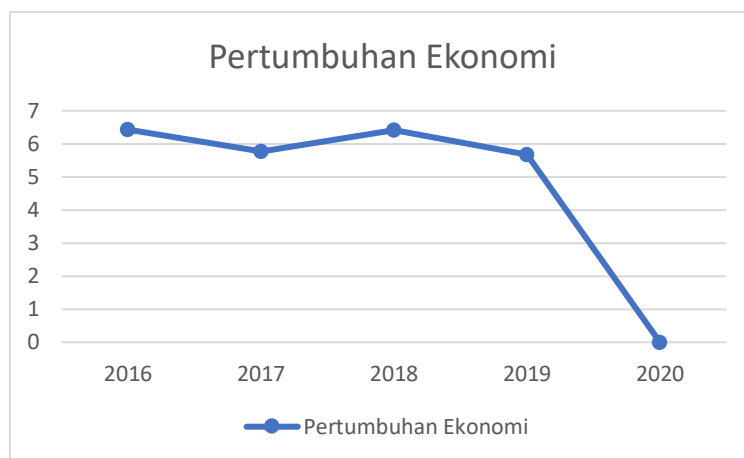
Tabel 4.2  
Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi | Persentase (%) |
|-------|---------------------|----------------|
| 2016  | 26.981.369,21       | 6,43           |
| 2017  | 28.538.993,62       | 5,77           |
| 2018  | 30.320.205,61       | 6,24           |
| 2019  | 32.039.593,42       | 5,67           |
| 2020  | 31.789.057,61       | -0,78          |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi untuk setiap Kabupaten Cianjur, maka didapatkan hasil perhitungan Pertumbuhan Ekonomi yaitu PDRB tahun sekarang dikurang dengan tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali

100 persen. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Cianjur pada tabel 4.2



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Gambar 4.2

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur mengalami fluktuasi atau naik turun, dapat dilihat dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan menjadi 5,77 persen dan tahun 2017-2018 mengalami kenaikan menjadi 6,42 persen, di tahun 2018-2019 kembali mengalami penurunan menjadi 5,67 persen dan terus menurun tajam pada tahun 2020 menjadi pertumbuhan ekonomi negative sebesar (0,78) persen.

#### 4.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diukur menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur seberapa besar suatu pendapatan asli daerahnya. Data Pendapatan Asli Daerah diambil dari situs [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) Kabupaten Cianjur periode 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.3  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur  
Periode 2016-2020

| Tahun | Realisasi PAD     | Target PAD        |
|-------|-------------------|-------------------|
| 2016  | Rp455.156.876.756 | Rp424.734.323.821 |
| 2017  | Rp535.232.527.172 | Rp478.178.435.243 |
| 2018  | Rp569.844.590.576 | Rp584.978.365.231 |
| 2019  | Rp628.558.761.864 | Rp602.568.453.265 |
| 2020  | Rp576.995.439.254 | Rp709.823.786.542 |

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah penulis (2022)

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten Cianjur, maka dapat dihasilkan perhitungan Pendapatan Asli Daerah dengan ukuran yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Mahmudi, 2016

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Cianjur pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

| Realisasi PAD     | Target PAD        | Persentase (%) |
|-------------------|-------------------|----------------|
| Rp455.156.876.756 | Rp424.734.323.821 | 107,16         |
| Rp535.232.527.172 | Rp478.178.435.243 | 111,93         |
| Rp569.844.590.576 | Rp584.978.365.231 | 97,41          |
| Rp628.558.761.864 | Rp602.568.453.265 | 104,31         |
| Rp576.995.439.254 | Rp709.823.786.542 | 81,29          |

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah penulis (2022)



Sumber : [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), data diolah penulis (2022)

Gambar 4.3

Grafik Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

Berdasarkan nilai diatas Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya, ini berarti Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Dapat dilihat dalam tabel 4.4 penurunan terjadi dari tahun 2016-2020 dengan persentase tertinggi ada di tahun 2017 sebesar 111,93 persen hal ini dapat merubah aktivitas belanja modal.

#### 4.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal diukur menggunakan Rasio Aktivitas Belanja Modal untuk mengukur seberapa besar suatu Belanja Modal daerah tersebut. Data Belanja Modal diambil dari situs [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) Kabupaten Cianjur periode 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5  
Belanja Modal Kabupaten Cianjur  
Periode 2016-2020

| Tahun | Realisasi Belanja Modal | Total Realisasi Belanja Daerah |
|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 2016  | Rp616.244.100.821       | Rp3.379.495.645.364            |
| 2017  | Rp823.214.700.634       | Rp3.664.124.536.436            |
| 2018  | Rp595.800.022.345       | Rp4.000.993.453.235            |
| 2019  | Rp690.653.593.571       | Rp3.935.275.647.342            |
| 2020  | Rp384.911.926.929       | Rp3.907.923.456.765            |

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan data Belanja Modal untuk Kabupaten Cianjur, maka dapat dihasilkan perhitungan Belanja Modal dengan ukuran yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Aktivitas Belanja Modal

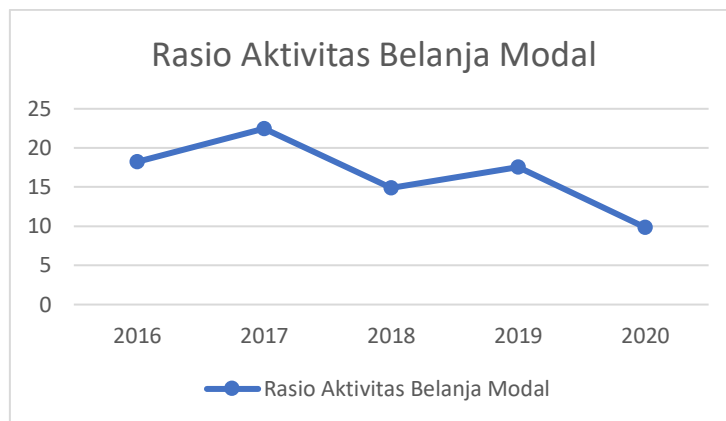
Mahmudi, 2016

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil Belanja Modal pada Kabupaten Cianjur pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Rasio Aktivitas Belanja Modal  
Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

| Tahun | Realisasi Belanja Modal | Total Realisasi Belanja Daerah | Persentase (%) |
|-------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2016  | Rp616.244.100.821       | Rp3.379.495.645.364            | 18,23          |
| 2017  | Rp823.214.700.634       | Rp3.664.124.536.436            | 22,47          |
| 2018  | Rp595.800.022.345       | Rp4.000.993.453.235            | 14,89          |
| 2019  | Rp690.653.593.571       | Rp3.935.275.647.342            | 17,55          |
| 2020  | Rp384.911.926.929       | Rp3.907.923.456.765            | 9,85           |

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), data diolah penulis (2022)



Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), data diolah penulis (2022)

Gambar 4.4

Grafik Rasio Aktivitas Belanja Modal  
Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Kabupaten Cianjur mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2016-2020.

### 4.3. Hasil Penelitian

#### 4.3.1. Hasil Analisis Data

Berdasarkan pengumpulan dan pengelolaan data dari setiap variabel yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dilakukan analisis mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel-variabel bebas tersebut meliputi Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ), dan Belanja Modal ( $Y$ ). analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan bantuan *software* khusus statistik yaitu SPSS versi 16.

#### 4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian Regresi Linear disebut juga sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik harus terpenuhi dalam regresi linear yaitu residual terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) jenis uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

##### 4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik.

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai Signifikansi  $> 0,05$ , maka nilai residual berdistribusi normal.
- Jika nilai Signifikansi  $< 0,05$ , maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.7  
Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                |                | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                              |                | 5                       |
| Normal Parameters <sup>a</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                | Std. Deviation | .93625705               |
| Most Extreme Differences       | Absolute       | .171                    |
|                                | Positive       | .171                    |
|                                | Negative       | -.130                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z           |                | .383                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)         |                | .999                    |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah dari SPSS ver. 16, 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 5 menunjukkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi  $0,999 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

#### 4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas). Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas ini adalah dengan metode *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*).

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Melihat nilai *Tolerance*: Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari  $> 0,10$  maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas.
- Melihat nilai *VIF*: Jika nilai *VIF* lebih kecil dari  $< 10,00$  maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Multikolinearitas

|   |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|---|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|   |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 | (Constant)             | -21.363                     | 5.643      |                           | -3.786 | .063 |                         |       |
|   | Pertumbuhan Ekonomi    | -.013                       | .025       | -.074                     | -.517  | .657 | .999                    | 1.001 |
|   | Pendapatan Asli Daerah | .380                        | .056       | .974                      | 6.837  | .021 | .999                    | 1.001 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Diolah dari SPSS ver.16, 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 5 dari nilai *Tolerance* disimpulkan bahwa nilai  $0,999 > 0,10$  artinya tidak terjadi multikolinearitas di mana dalam model regresi tidak ada interkorelasi di antara variabel bebas. Dari nilai *VIF* disimpulkan bahwa nilai  $1,001 < 10,00$  artinya tidak terjadi multikolinearitas di mana dalam model regresi tidak ada interkorelasi di antara variabel bebas.

#### 4.3.2.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadi korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada atau tidaknya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain. Pengujian autokorelasi menggunakan uji Run Test, digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Apabila *Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05* (random) maka syarat tidak adanya autokorelasi di dalam model regresi linear tersebut. Metode pengujian menggunakan metode Run Test. Hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 4.9  
Hasil Uji Autokorelasi

|                         | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value <sup>a</sup> | .04482                  |
| Cases < Test Value      | 2                       |
| Cases >= Test Value     | 3                       |
| Total Cases             | 5                       |
| Number of Runs          | 4                       |
| Z                       | .109                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)  | .913                    |

a. Median

Sumber : data diolah dari SPSS ver.16, 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 5 menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 0,913 atau lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Sehingga analisis linear dapat dilanjutkan.

#### 4.3.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menunjukkan ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji spearman rho merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedastisitas, uji spearman rho dilakukan dengan cara mengkorelasi variabel independent dengan residual. Untuk menguji apakah suatu data terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji spearman rho. Jika Nilai Sig. 2-tailed > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas, jika Nilai Sig. 2-tailed < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila terjadi masalah heteroskedastisitas, akan mengakibatkan sebuah keraguan (ketidakkakuratan pada suatu hasil analisis regresi). Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Tabel 4.10  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

|                |                         |                         | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan Asli Daerah | Unstandardized Residual |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Spearman's rho | Pertumbuhan Ekonomi     | Correlation Coefficient | 1.000               | 1.000**                | .500                    |
|                |                         | Sig. (2-tailed)         | .                   | .                      | .391                    |
|                |                         | N                       | 5                   | 5                      | 5                       |
|                | Pendapatan Asli Daerah  | Correlation Coefficient | 1.000**             | 1.000                  | .500                    |
|                |                         | Sig. (2-tailed)         | .                   | .                      | .391                    |
|                |                         | N                       | 5                   | 5                      | 5                       |
|                | Unstandardized Residual | Correlation Coefficient | .500                | .500                   | 1.000                   |
|                |                         | Sig. (2-tailed)         | .391                | .391                   | .                       |
|                |                         | N                       | 5                   | 5                      | 5                       |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 5 menunjukkan hasil Analisis output SPSS bahwa Nilai Sig (2-tailed) Pertumbuhan Ekonomi 0,391 > 0,05 dan Nilai Sig (2-tailed) Pendapatan Asli Daerah 0,391 > 0,05. Maka tidak terjadi gejala nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 (tingkat kepercayaan statistik 95% atau 0,05).

#### 4.3.3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yaitu melihat Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja.

Tabel 4.11  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

|       |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| Model |                        |                             |            |                           |        |      |                         |       |
| 1     | (Constant)             | -21.363                     | 5.643      |                           | -3.786 | .063 |                         |       |
|       | Pertumbuhan Ekonomi    | -.013                       | .025       | -.074                     | -.517  | .657 | .999                    | 1.001 |
|       | Pendapatan Asli Daerah | .380                        | .056       | .974                      | 6.837  | .021 | .999                    | 1.001 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah dari SPSS ver.16, 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 6 menunjukkan bahwa diketahui model persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = (21,363) C + (0,013) PE + 0,380 PAD$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

a = Koefisien Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien Regresi dari masing-masing variabel

$X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_2$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penjelasan dari persamaan diatas sebagai berikut :

a. Nilai Konstanta (a)

Nilai Konstanta sebesar -21,363 artinya apabila semua variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah nilainya 0, maka Belanja Modal nilainya adalah -21,363.

b. Koefisien Regresi Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ )

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi bernilai negative yaitu -0,013 hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan searah dengan belanja modal. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen dari pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar -0,013.

c. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ )

Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah bernilai positif yaitu 0,380 hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan searah dengan belanja modal. Setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu persen, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,380.



#### 4.3.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Secara statistik, setidaknya pengukuran dari analisis ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan Koefisien determinasi.

##### 1. Uji Parsial (t-test)

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- Jika nilai  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- Cara untuk menemukan t tabel yaitu  $t \text{ tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$

Adapun hasil SPSS analisis korelasi berganda sebagai berikut :

Tabel 4.12  
Hasil Uji Parsial (t-test)

| Model |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)             | -21.363                     | 5.643      |                           | -3.786 | .063 |
|       | Pertumbuhan Ekonomi    | -.013                       | .025       | -.074                     | -.517  | .657 |
|       | Pendapatan Asli Daerah | .380                        | .056       | .974                      | 6.837  | .021 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah dari SPSS ver.16, 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 7 menunjukkan hasil output ini diketahui bahwa :

$$t \text{ tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 2) = 4,303$$

- Diketahui bahwa nilai Sig. untuk pengaruh  $X_1$  terhadap Y adalah sebesar  $0,657 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-0,517 < \text{nilai } t \text{ tabel } 4,303$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal (Y) secara parsial.
- Diketahui bahwa nilai Sig. untuk pengaruh  $X_2$  terhadap Y adalah sebesar  $0,021 < 0,05$  dan nilai t hitung  $6,837 > \text{nilai } t \text{ tabel } 4,303$  sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal (Y).

##### 2. Uji Simultan (F-test)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y
- Cara untuk menemukan F tabel yaitu  $F_{tabel} = F(k ; n-k)$

Adapun hasil SPSS analisis korelasi berganda sebagai berikut :

Tabel 4.13  
Hasil Uji Simultan (F-test)

| ANOVA <sup>b</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 82.997         | 2  | 41.498      | 23.671 | .041 <sup>a</sup> |
|                    | Residual   | 3.506          | 2  | 1.753       |        |                   |
|                    | Total      | 86.503         | 4  |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah dari SPSS ver.16, 2022

$F_{tabel} = F(k ; n-k) = F(2 ; 3) = 9,55$

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 7 menunjukkan output ini diketahui bahwa nilai pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,41 > 0,05$  dan nilai F hitung  $23,671 > 9,55$  sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) dan Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) secara simultan terhadap Belanja Modal (Y).

### 3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan belanja modal sebagai berikut :

Tabel 4.14  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .980 <sup>a</sup> | .959     | .919              | 1.32407                    |

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Data diolah dari SPSS ver. 16, 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 7 menunjukkan output ini diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,919 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) dan Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) secara simultan terhadap Belanja Modal ( $Y$ ) adalah sebesar 91,9%, sedangkan sebesar 8,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### 4.4. Pembahasan

##### 4.4.1. Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada Kabupaten Cianjur periode 2016-2020 dengan menggunakan *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16 tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat pada Bab 2 sebelumnya sudah ditentukan Hipotesis yang menjadi patokan penelitian ini, hipotesisnya demikian :

Hipotesis 1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.

Hipotesis 2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.

Namun, setelah dilakukan uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) ditemukan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.15

Hasil Pengujian Hipotesis

| Kode           | Hipotesis   | Hasil Uji Hipotesis |
|----------------|---|---------------------|
| H <sub>1</sub> | Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal    | Ditolak             |
| H <sub>2</sub> | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal | Diterima            |

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji signifikansi dari nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi dapat dilihat dari nilai t dan nilai signifikansinya.

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Mencari  $t_{tabel}$  pada signifikansi  $0,05/2=0,025$  (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $df=5-2-1=2$ . Berikut ini merupakan hasil uji t yaitu sebagai berikut :

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.12, variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) memiliki signifikansi 0,657 lebih besar dari taraf nyata 0,05. Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  di mana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,517 dan  $t_{tabel}$  (0,025 ; 2) yaitu sebesar 4,303 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-0,571 < 4,303$ . Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga  $H_1$  dalam penelitian ini ditolak.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4.12, variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) memiliki signifikansi 0,021 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 atau  $0,021 < 0,05$ . Sedangkan untuk hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  di mana nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,837 dan  $t_{tabel}$  (0,025 ; 2) yaitu sebesar 4,303 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $6,837 > 4,303$ . Oleh karena itu, disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga  $H_2$  dalam penelitian ini diterima.

#### 4.4.2. Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Pada Bab 2 sebelumnya sudah ditentukan Hipotesis yang menjadi patokan penelitian ini, hipotesisnya demikian :

Hipotesis 3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020.

Namun, setelah diadakan uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) ditemukan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.16  
Hasil Pengujian Hipotesis

| Kode           | Hipotesis   | Hasil Uji Hipotesis |
|----------------|---|---------------------|
| H <sub>3</sub> | Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal | Diterima            |

Uji Statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji F penelitian ini berdasarkan pada tabel 4.13 yaitu :

Hasil uji F menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 23,671 dengan nilai signifikansi sebesar 0,41. Untuk  $F_{tabel}$  diperoleh hasil sebesar 9,55 pada signifikansi 0,05 dengan  $F(k ; n-k) = F(2;3) = 9,55$ . Sehingga dapat disimpulkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $23,671 > 9,55$  dengan signifikansi  $0,41 > 0,05$  maka dalam hal ini  $H_3$  diterima. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020.

#### **4.4.3. Uji Koefisien Determinasi**

Berdasarkan pada Tabel 4.14, nilai *Adjusted R square* sebesar 0,919. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal sebagai variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,919 atau sebesar 91,9%, sedangkan sisanya 8,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **4.5. Interpretasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

##### **4.5.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah Pertumbuhan Ekonomi akan mempengaruhi kebutuhan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana secara langsung kepada daerah, pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan kondisi perekonomian daerah dan tidak memberikan pemasukan terhadap daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama untuk penyusunan APBD dan Belanja Modal di Kabupaten Cianjur, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah serta kondisi sosial politik daerah. Kabupaten Cianjur adalah salah satu yang memberikan kontribusi dalam bidang sektor ekonomi daerah, dan untuk sektor industry unggulan ada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Perekonomian daerah Kabupaten Cianjur, sektor pertanian merupakan kontribusi paling besar terhadap PDRB. Kontribusi yang besar pada sektor pertanian ini karena kondisi wilayah Kabupaten Cianjur yang cocok dan mendukung untuk dikembangkannya sektor pertanian (Lampiran 8). Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan atau penurunan, maka Belanja Modal tidak mempengaruhi besar kecilnya penerapan terhadap Belanja Modal Kabupaten Cianjur.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Hal ini pula yang mempengaruhi alokasi belanja modal karena sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya belanja modal.

Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya jika semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka belanja modal semakin rendah.

Hasil penelitian serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Mundiroh (2019) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal karena Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan dana secara langsung kepada daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Waskito, dkk (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, hasil penelitian ini tidak serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofrizal (2017) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal karena Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, terutama dalam infrastruktur oleh pemerintah untuk mengalokasikan Belanja Modal guna melengkapi sarana dan prasarana.

#### **4.5.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal. Dan hasil pengujian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Cianjur.

Menurut teori Peningkatan Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Madiasmo, 2018). Dengan kata lain dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan pula bagi pemerintah daerah membuat pembangunan daerah sebagai prioritas utama untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Untuk itu di Kabupaten Cianjur peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya Belanja Modal.

Secara teoritis, dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Alokasi Belanja Modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari Belanja Modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaan PAD.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mundiroh (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal karena Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan Belanja Modal dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Waskito, dkk (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

#### **4.5.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik, dalam penelitian ini variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal. Setelah dilakukan hipotesis secara simultan, berdasarkan tabel ANOVA (Tabel 4.13) terlihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,41 yang lebih besar dari nilai taraf nyata 0,05. Ini berarti Uji F menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian ini, variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan mampu sebesar 91,9% mempengaruhi Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini berarti jika variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah naik maka variabel Belanja Modal juga mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya apabila mengalami penurunan maka Belanja Modal mengalami penurunan. Dengan kata lain bahwa apabila kedua variabel X diuji bersama-sama maka tidak akan mempengaruhi besar kecilnya penetapan Belanja Modal Kabupaten Cianjur.

Hasil penelitian ini serupa dengan peneliti sebelumnya yaitu Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) di mana penelitian mereka menyebutkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur Periode 2016-2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki  $t$  hitung (0,517) atau lebih kecil dari  $t$  tabel 4,303, artinya  $(0,517) < 4,303$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengartikan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan atau penurunan maka Belanja Modal tidak akan berpengaruh. Karena pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana secara langsung kepada daerah dan hanya menunjukkan kondisi perekonomian di Kabupaten Cianjur.
2. Terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki  $t$  hitung sebesar 6,837 atau lebih besar dari  $t$  tabel 4,303, artinya  $6,837 > 4,303$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengartikan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka meningkatnya Belanja Modal Kabupaten Cianjur.
3. Terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020. Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki  $F$  hitung 23,671 atau lebih besar dari nilai  $F$  tabel 9,55, artinya  $23,671 > 9,55$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Cianjur periode 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Belanja Modal akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah menurun maka Belanja Modal menurun.

#### **5.2. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan setelah melakukan uji pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan dapat meningkatkan potensi dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten Cianjur sehingga dapat meningkatkan Belanja Modal dalam APBD Kabupaten



2. Cianjur. Dengan meningkatnya Belanja Modal tersebut dapat diikuti dengan meningkatnya fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur, serta rujukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan jumlah sampel penelitian yang lebih luas dan variabel yang lebih bervariasi untuk lebih dapat mengetahui bahwa penerimaan apa saja yang mempengaruhi belanja modal, karena hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh Belanja Modal sebagai variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,919 atau sebesar 91,9%, sedangkan sisanya 8,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian, dan dapat ditindak lanjuti oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel diluar dari Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, mengingat sangat menariknya variabel Pertumbuhan Ekonomi, agar dapat lebih fokus terhadap variabel tersebut, serta menggali tentang Belanja Modal dari daerah-daerah lain di Jawa Barat karena kemungkinan besar Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selain itu, tidak hanya menggunakan faktor internal tetapi menggunakan faktor eksternal yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti kurs dan kondisi ekonomi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *JJAR*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cianjur Menurut Lapangan Usaha*. Cianjur.
- Biro Sistem Informasi UMY. (2021, Desember 18). Retrieved from <https://www.umi.ac.id/bahas-akuntansi-sektor-publik-dan-pembangunan-ekonomi-dua-gubes-umi-resmi-dikukuhkan>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). Retrieved from [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id):  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=10&pe mda=05>
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Haryanto, M. L. (2022). Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
- Kepramareni, P. e. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Krisna*, 15-29.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2018*. Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mayasari, L. P., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah.

- Mutaqin, O. Z. (2020). *Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2020 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.*
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2020 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.*
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- PT Kolaborasi Mediapreneur Nusantara. (2022, April 21). Retrieved from PikiranRakyat.com: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01361592/untuk-penanganan-virus-corona-covid-19-pemkab-cianjur-gelontorkan-dana-rp-100-miliar>
- Purba, E. S., Pradipta, E. L., Manullang, R. T., & Nainggolan, B. R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jpurnal of Economic, Business and Accounting*.
- Rohardian, P., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Kota Se-Jawa.
- S, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal of Economic Management and Accounting*, 37.
- Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah*.
- Saretta, I. R. (2020). Retrieved from cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-apa-itu-pertumbuhan-ekonomi-dan-bagaimana-cara-mengukurnya#:~:text=Ketiga%20indikator%20itu%20adalah%20pendapatan,kerjanya%2C%20dan%20menurunnya%20tingkat%20kemiskinan.>
- Sirait, R. W. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Merangin.

Waskito, Zuhrotun, & Ruserliyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Rizqia Utami

Alamat : Jalan Wijaya Kusuma RT.01/RW.05 N0.39,  
Kabupaten Cianjur, 43253

Tempat dan Tanggal Lahir : Cianjur, 17 Juni 2000

Agama : Islam

Pendidikan :

1. SD : SD Negeri Pacet 1
2. SMP : SMP Negeri 1 Cipanas
3. SMA : SMA Negeri 1 Sukaresmi
4. Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2022

Peneliti,

(Nurul Rizqia Utami)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Laporan Realisasi Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2020 (dalam rupiah)

| URAIAN   | REF         | ANGGARAN          | REALISASI         | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) | ( % ) | REALISASI         |
|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|
|  |             | 2020              | 2020              |                           |       | 2019              |
| <b>PENDAPATAN</b>  | 5.1.2.1     |                   |                   |                           |       |                   |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                  | 5.1.2.1.1   |                   |                   |                           |       |                   |
| Pendapatan Pajak Daerah  | 5.1.2.1.1.1 | 141.389.894.717   | 161.490.626.173   | 20.100.731.456            | 114   | 195.831.346.090   |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                    | 5.1.2.1.1.2 | 23.137.524.744    | 19.823.951.893    | -3.313.572.851            | 86    | 34.470.835.983    |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 5.1.2.1.1.3 | 10.152.779.924    | 10.152.779.924    | 0                         | 100   | 9.167.729.168     |
| Lain - Lain PAD Yang Sah                                       | 5.1.2.1.1.4 | 425.889.013.012   | 385.528.081.264   | -40.360.931.748           | 91    | 389.088.850.623   |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                  |             | 600.569.212.397   | 576.995.439.254   | -23.573.773.143           | 96    | 628.558.761.864   |
|  |             |                   |                   |                           |       |                   |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                     | 5.1.2.1.2   |                   |                   |                           |       |                   |
| <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>            |             |                   |                   |                           |       |                   |
| Dana Bagi Hasil Pajak  | 5.1.2.1.2.1 | 65.131.423.558    | 58.154.654.274    | -6.976.769.284            | 89    | 45.979.647.341    |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                               | 5.1.2.1.2.2 | 41.048.912.416    | 38.966.011.211    | -2.082.901.205            | 95    | 24.668.241.568    |
| Dana Alokasi Umum  | 5.1.2.1.2.3 | 1.508.219.679.000 | 1.472.420.591.000 | -35.799.088.000           | 98    | 1.627.020.432.000 |
| Dana Alokasi Khusus  | 5.1.2.1.2.4 | 526.309.000.021   | 521.073.474.108   | -5.235.525.913            | 99    | 564.171.044.968   |
| Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan                  |             | 2.140.709.014.995 | 2.090.614.730.593 | -50.094.284.402           | 98    | 2.261.839.365.877 |
|  |             |                   |                   |                           |       |                   |
| <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                     |             |                   |                   |                           |       |                   |
| Dana Penyesuaian   | 5.1.2.1.2.5 | 423.935.085.000   | 423.935.085.000   | 0                         | 100   | 0                 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya          |             | 423.935.085.000   | 423.935.085.000   | 0                         | 100   | 0                 |
|  |             |                   |                   |                           |       |                   |
| <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                            |             |                   |                   |                           |       |                   |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                    | 5.1.2.1.2.6 | 252.471.331.551   | 228.737.033.353   | -23.734.298.198           | 91    | 238.044.199.580   |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi                            |             | 252.471.331.551   | 228.737.033.353   | -23.734.298.198           | 91    | 238.044.199.580   |
|  |             |                   |                   |                           |       |                   |
| <b>BANTUAN KEUANGAN</b>  |             |                   |                   |                           |       |                   |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 5.1.2.1.2.7 | 241.754.084.159   | 219.343.844.119   | -22.410.240.040           | 91    | 158.628.362.719   |
| Jumlah Bantuan Keuangan  |             | 241.754.084.159   | 219.343.844.119   | -22.410.240.040           | 91    | 158.628.362.719   |
| Jumlah Pendapatan Transfer                                     |             | 3.058.869.515.705 | 2.962.630.693.065 | -96.238.822.640           | 97    | 2.658.511.928.176 |

|   |             |                   |                   |                  |     |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|-------------------|
| LAIN -LAIN<br>PENDAPATAN YANG<br>SAH    | 5.1.2.1.3   |                   |                   |                  |     |                   |
| Pendapatan Hibah                        | 5.1.2.1.3.1 | 307.927.700.000   | 300.875.530.000   | -7.052.170.000   | 98  | 284.939.800.000   |
| Pendapatan Lainnya                      | 5.1.2.1.3.2 | 0                 | 0                 | 0                | 0   | 423.395.943.600   |
| Jumlah Lain-lain<br>Pendapatan Yang Sah |             | 307.927.700.000   | 300.875.530.000   | -7.052.170.000   | 98  | 708.335.743.600   |
| JUMLAH<br>PENDAPATAN                    |             | 3.967.366.428.102 | 3.840.501.662.319 | -126.864.765.783 | 97  | 3.995.406.433.640 |
|   |             |                   |                   |                  |     |                   |
| <u>BELANJA</u>                          | 5.1.2.2     |                   |                   |                  |     |                   |
| BELANJA OPERASI                         | 5.1.2.2.1   |                   |                   |                  |     |                   |
| Belanja Pegawai                         | 5.1.2.2.1.1 | 1.631.572.192.276 | 1.491.484.414.346 | -140.087.777.930 | 91  | 1.484.897.593.811 |
| Belanja Barang                          | 5.1.2.2.1.2 | 1.126.765.422.111 | 1.024.438.374.239 | -102.327.047.872 | 91  | 1.026.203.632.190 |
| Hibah                                   | 5.1.2.2.1.3 | 188.308.031.000   | 187.383.031.000   | -925.000.000     | 100 | 70.743.361.454    |
| Bantuan Sosial                          | 5.1.2.2.1.4 | 6.925.500.000     | 6.220.000.000     | -705.500.000     | 90  | 2.436.500.000     |
| Jumlah Belanja Operasi                  |             | 2.953.571.145.387 | 2.709.525.819.585 | -244.045.325.802 | 92  | 2.584.281.087.455 |
|   |             |                   |                   |                  |     |                   |
| BELANJA MODAL                           | 5.1.2.2.2   |                   |                   |                  |     |                   |
| Belanja Tanah                           | 5.1.2.2.2.1 | 11.781.128.750    | 11.699.383.946    | -81.744.804      | 99  | 22.708.327.261    |
| Belanja Peralatan dan<br>Mesin          | 5.1.2.2.2.2 | 174.667.979.930   | 163.813.210.060   | -10.854.769.870  | 94  | 121.612.231.282   |
| Belanja Gedung Dan<br>Bangunan          | 5.1.2.2.2.3 | 169.134.159.880   | 138.620.775.532   | -30.513.384.348  | 82  | 144.294.618.951   |
| Belanja Jalan, Irigasi,<br>dan Jaringan | 5.1.2.2.2.4 | 70.702.094.137    | 67.273.343.936    | -3.428.750.201   | 95  | 396.667.435.261   |
| Belanja Aset Tetap<br>Lainnya           | 5.1.2.2.2.5 | 3.527.450.269     | 3.505.213.455     | -22.236.814      | 99  | 5.370.980.816     |
| Jumlah Belanja Modal                    |             | 429.812.812.966   | 384.911.926.929   | -44.900.886.037  | 90  | 690.653.593.571   |
|   |             |                   |                   |                  |     |                   |
| BELANJA TIDAK<br>TERDUGA                | 5.1.2.2.3   |                   |                   |                  |     |                   |
| Belanja Tak Terduga                     |             | 133.425.469.619   | 112.162.975.110   | -21.262.494.509  | 84  | 4.731.478.500     |
| Jumlah Belanja Tak<br>Terduga           |             | 133.425.469.619   | 112.162.975.110   | -21.262.494.509  | 84  | 4.731.478.500     |
| Jumlah Belanja                          |             | 3.516.809.427.972 | 3.206.600.721.624 | -310.208.706.348 | 91  | 3.279.666.159.526 |

Lampiran 2  
Data Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

| $Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$ |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Tahun   | Pertumbuhan Ekonomi | Persentase (%) |
| 2016  | 26.981.369,21       | 6,43           |
| 2017  | 28.538.993,62       | 5,77           |
| 2018  | 30.320.205,61       | 64,24          |
| 2019  | 32.039.593,42       | 5,67           |
| 2020  | 31.789.057,61       | -0,78          |

Lampiran 3  
Data Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

| $Rasio\ Efektivitas\ Pendapatan\ Asli\ Daerah = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$ |                   |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Tahun  | Realisasi PAD     | Target PAD        | Persentase (%) |
| 2016   | Rp455.156.876.756 | Rp424.734.323.821 | 107,16         |
| 2017   | Rp535.232.527.172 | Rp478.178.435.243 | 111,93         |
| 2018   | Rp569.844.590.576 | Rp584.978.365.231 | 97,41          |
| 2019   | Rp628.558.761.864 | Rp602.568.453.265 | 104,31         |
| 2020   | Rp576.995.439.254 | Rp709.823.786.542 | 81,29          |

Lampiran 4  
Data Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal

| Tahun | Realisasi Belanja Modal | Total Realisasi Belanja Daerah | Persentase (%) |
|-------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2016  | Rp616.244.100.821       | Rp3.379.495.645.364            | 18,23          |
| 2017  | Rp823.214.700.634       | Rp3.664.124.536.436            | 22,47          |
| 2018  | Rp595.800.022.345       | Rp4.000.993.453.235            | 14,89          |
| 2019  | Rp690.653.593.571       | Rp3.935.275.647.342            | 17,55          |
| 2020  | Rp384.911.926.929       | Rp3.907.923.456.765            | 9,85           |



Lampiran 5  
Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                |                | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                              |                | 5                       |
| Normal Parameters <sup>a</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                | Std. Deviation | .93625705               |
| Most Extreme Differences       | Absolute       | .171                    |
|                                | Positive       | .171                    |
|                                | Negative       | -.130                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z           |                | .383                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)         |                | .999                    |

a. Test distribution is Normal.

Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)             | -21.363                     | 5.643      |                           | -3.786 | .063 |                         |       |
|       | Pertumbuhan Ekonomi    | -.013                       | .025       | -.074                     | -.517  | .657 | .999                    | 1.001 |
|       | Pendapatan Asli Daerah | .380                        | .056       | .974                      | 6.837  | .021 | .999                    | 1.001 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Autokorelasi (Run Test)

**Runs Test**

|                         | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan Asli Daerah | Belanja Modal |
|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Test Value <sup>a</sup> | 5.77                | 104.31                 | 17.55         |
| Cases < Test Value      | 2                   | 2                      | 2             |
| Cases >= Test Value     | 3                   | 3                      | 3             |
| Total Cases             | 5                   | 5                      | 5             |
| Number of Runs          | 2                   | 4                      | 4             |
| Z                       | -.982               | .109                   | .109          |
| Asymp. Sig. (2-tailed)  | .326                | .913                   | .913          |

a. Median

Uji Heteroskedastisitas

**Correlations**

|                |                         |                         | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan Asli Daerah | Belanja Modal | Unstandardized Residual |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| Spearman's rho | Pertumbuhan Ekonomi     | Correlation Coefficient | 1.000               | .300                   | .300          | -.300                   |
|                |                         | Sig. (2-tailed)         | .                   | .624                   | .624          | .624                    |
|                |                         | N                       | 5                   | 5                      | 5             | 5                       |
|                |                         |                         |                     |                        |               |                         |
|                | Pendapatan Asli Daerah  | Correlation Coefficient | .300                | 1.000                  | 1.000**       | .000                    |
|                |                         | Sig. (2-tailed)         | .624                | .                      | .             | 1.000                   |
|                |                         | N                       | 5                   | 5                      | 5             | 5                       |
|                | Belanja Modal           | Correlation Coefficient | .300                | 1.000**                | 1.000         | .000                    |
|                |                         | Sig. (2-tailed)         | .624                | .                      | .             | 1.000                   |
|                |                         | N                       | 5                   | 5                      | 5             | 5                       |
|                | Unstandardized Residual | Correlation Coefficient | -.300               | .000                   | .000          | 1.000                   |
|                |                         | Sig. (2-tailed)         | .624                | 1.000                  | 1.000         | .                       |
|                |                         | N                       | 5                   | 5                      | 5             | 5                       |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6  
Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)             | -21.363                     | 5.643      |                           | -3.786 | .063 |
|       | Pertumbuhan Ekonomi    | -.013                       | .025       | -.074                     | -.517  | .657 |
|       | Pendapatan Asli Daerah | .380                        | .056       | .974                      | 6.837  | .021 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Lampiran 7  
Uji t test

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)             | -21.363                     | 5.643      |                           | -3.786 | .063 |
|       | Pertumbuhan Ekonomi    | -.013                       | .025       | -.074                     | -.517  | .657 |
|       | Pendapatan Asli Daerah | .380                        | .056       | .974                      | 6.837  | .021 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji F test

**ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 82.997         | 2  | 41.498      | 23.671 | .041 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 3.506          | 2  | 1.753       |        |                   |
|       | Total      | 86.503         | 4  |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .980 <sup>a</sup> | .959     | .919              | 1.32407                    |

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

**Lampiran 8**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur menurut Lapangan Usaha Tahun**  
**2016-2020**

| Lapangan Usaha  | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur Menurut Lapangan Usaha<br>(Persen) |       |       |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
|   | 2020   | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               | 1.75   | 3.24  | 3.52  | 0.91  | 4.60  |
| Pertambangan dan Penggalian                                       | -0.04  | -0.50 | 4.00  | 0.88  | -0.14 |
| Industri Pengolahan   | 0.73   | 11.33 | 11.27 | 15.68 | 7.45  |
| Pengadaan Listrik dan Gas   | -1.89  | 2.25  | 9.17  | 2.80  | 6.14  |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,<br>Limbah dan Daur Ulang       | 17.47  | 6.31  | 6.71  | 7.62  | 6.38  |
| Konstruksi  | -6.56  | 4.60  | 7.87  | 8.36  | 7.46  |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi<br>Mobil dan Sepeda Motor  | -7.23  | 4.76  | 4.39  | 4.46  | 4.66  |
| Transportasi dan Pergudangan                                      | -2.40  | 8.11  | 8.95  | 8.80  | 8.62  |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan<br>Minum                           | -3.00  | 7.04  | 8.76  | 8.85  | 9.74  |
| Informasi dan Komunikasi  | 22.07  | 8.58  | 10.96 | 12.68 | 12.61 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi  | 0.77   | 5.29  | 5.16  | 2.87  | 11.99 |
| Real Estate   | 0.01   | 10.68 | 10.16 | 9.29  | 5.23  |
| Jasa Perusahaan   | -16.22   | 9.09  | 9.08  | 9.06  | 8.27  |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan<br>dan Jaminan Sosial Wajib | -1.82  | 3.08  | 1.57  | 3.30  | 3.55  |
| Jasa Pendidikan   | 4.35   | 6.30  | 7.47  | 8.61  | 7.13  |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                                | 1.83   | 7.80  | 8.42  | 9.76  | 9.71  |
| Jasa lainnya  | -2.23  | 7.24  | 7.90  | 9.69  | 8.71  |
| PDRB  | -0.78  | 5.67  | 6.24  | 5.77  | 6.43  |